

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Kiawa 2 Induk Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa

Kevin Rumondor¹

Agustinus B Pati²

Trilke Tulung³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Kiawa 2 Induk. Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa ini. Media massa, baik elektronik maupun cetak, seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi, merupakan salah satu motif yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait dengan kepemimpinan. Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui obsevasi, wawancara dan studi kepustakaan. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini terlihat bahwa kepemimpinan kepala desa Kiawa Dua dalam mewujudkan *good governance* di Desa Kiawa Dua dalam aspek transparansi sudah baik di mata masyarakat dan juga BPD, kegiatan transparansi dari kepala desa terwujud dalam berbagai hal dan kegiatan dimana pemerintah desa terbuka terhadap masukan dan juga memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat yang membutuhkan dalam berbagai situasi baik formal maupun tidak formal.

Kata Kunci: : Kepemimpinan, Kepala Desa, Good Governance

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

Sekretariat:

Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Pendahuluan

Kepemimpinan seorang kepala desa pada sebuah desa merupakan sosok sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana kepala desa merupakan pemimpin yang dipilih secara demokratis layaknya kepala daerah dan presiden, oleh sebab itu, maju mundurnya sebuah desa terdapat factor kepemimpinan disitu. Dalam konteks kepemimpinan di Desa, Seorang pemimpin harus membuat rencana kerja yang akan dilakukan selama masa jabatannya, biasanya berupa visi dan misi yang telah disampaikan sebelum menjabat. Pendamping Desa perlu untuk membantu agar visi dan misi tersebut benar-benar realistis serta terukur. Rencana kerja tersebut juga harus disampaikan kepada masyarakat agar mereka mengerti apa yang menjadi keinginan pemimpin desa, hal ini juga untuk mendapatkan umpan balik masukan dari masyarakat terkait rencana tersebut. Dengan adanya kepemimpinan efektif, maka diharapkan segenap potensi kewenangan desa yang luas dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya arus informasi, komunikasi dan transportasi, komunikasi dan transportasi antar Negara di dunia, menuntut suatu Negara untuk memprakondisikan dirinya dengan melakukan upaya pemberdayaan (*empowering*) dan reformasi total atas kehidupan politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan nasional. Dalam kondisi persaingan bebas di era globalisasi, peran pemerintah mengalami pergeseran, dalam arti bahwa pemerintah sudah tidak lagi menjalankan peran secara dominan dalam berbagai aktivitas Negara melainkan hanya sebagai fasilitator bagi kelancaran arus perdagangan dan persaingan bebas. Ini menuntut kondisi Negara (pemerintah) dengan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) agar memperoleh kepercayaan yang besar dari masyarakat serta agar terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan arus investasi guna mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

maupun mikro ekonomi.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang diciptakan secara bersama oleh semua elemen yang ada di suatu wilayah. Jika ditingkat desa, tata pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang diciptakan secara bersama oleh pemerintah desa, kelembagaan politik, dan kelembagaan lain di desa. "Tata pemerintahan yang baik merujuk pada proses penciptaan hubungan kerjasama antara lembaga desa yang ada di desa untuk membuat peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa" (Joko Purnomo, 2008:19).

Penerapan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Para pejabat publik, unsur - unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama - sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik.

Pemerintahan lokal yang kuat dan otonom tidak akan bermakna bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh transparansi, akuntabilitas, responsipitas dan partisipasi masyarakat. Penerapan *good governance* di level desa merupakan sebuah solusi canggih terhadap *bad governance* yaitu sebuah pemerintahan desa yang didominasi oleh kepala desa beserta elit desa, yang kurang berbasis kepada partisipasi masyarakat serta transparansi, akuntabilitas, dan resvonsipitas yang terbatas. Sehingga melalui penerapan prinsip *good governance* tidak akan muncul lagi pola kepemimpinan desa yang *benevolent*, *mandatory* dan otoritardari kondisi struktur desa yang bias elit, sentralistik, dan feodal, sebaliknya akan muncul kepemimpinan sosial yang partisipatif, responsive dan demokratis. Dengan *good governance*, warga desa akan

mempunyai ruang dan kapasitas yang leluasa untuk bersuara, akses dan kontrol.

Dalam mendukung terwujudnya semua partisipasi, tugas dan wewenang para aparat desa maka diperlukan adanya pembentukan atau penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) ditingkat lokal seperti desa, agar tercipta kesejahteraan sosial, baik dari segi ekonomi, politik dan sosial. Terbangunnya *democratic governance* di desa juga akan mengurangi *high cost* secara sosial maupun ekonomi.

Desa Kiawa 2 Induk merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, dari pengamatan sementara di lapangan dalam menjalankan pemerintahannya dengan menerapkan konsep-konsep dari *good governance*, yaitu yang berbasis kepada partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, responsipitas, demokratis, dan pelayanan publik yang baik belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip dalam pelayanan kepada masyarakat seperti belum adanya transparansi pemerintah terhadap refocusing anggaran dana desa, pengambilan keputusan yang tidak mewakili unsur-unsur masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi beberapa unsur yang menonjol akan belum maksimalnya penerapan prinsip *good governance* di Desa Kiwa II Induk Kecamatan Kawangkoan Utara. Kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan prinsip *good governance* sangatlah penting untuk menjamin terwujudnya prinsip-prinsip dari *good governance* tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perincian informan dalam penelitian ini terdiri dari :

- Hukum Tua Desa Kiawa 2 Induk,
- 2 Anggota BPD
- 2 Perangkat Desa
- 1 Tokoh Masyarakat
- 3 Masyarakat Desa Kiawa 2 Induk.

Yang menjadi fokus penelitian disini adalah peran Hukum Tua dalam

penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan Karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dikemukakan oleh UNDP (1997) dalam (Sirajjudin, Sukriano, Winardi, 2012:39-40) yang mana peneliti hanya memilih 3 prinsip saja disesuaikan dengan kondisi di lapangan:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)
2. Transparansi (*Transparency*)
3. Daya tangkap (*Responsiveness*)

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Pembahasan

1. Transparansi

Mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan bentuk kesepakatan dimana penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diciptakan secara bersama dengan berbagai elemen-elemen yang ada disuatu wilayah. Tata pemerintahan yang baik ditingkat desa merupakan suatu bentuk kesepakatan tentang penyelenggaraan dalam pemerintahan desa yang dapat diciptakan secara bersama oleh suatu pemerintahan desa, kelembagaan desa, kelembagaan politik serta kelembagaan lainnya yang ada di desa. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik biasanya merujuk pada suatu proses struktur kelembagaan yang ada di desa untuk membuat peraturan-peraturan yang dapat digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa (Purnomo, 2008:19).

Kepemimpinan kepala desa Desa kiawa dua dalam mewujudkan *good governance* dari aspek transparansi sudah tergolong baik, dimana kepala desa mampu memberikan informasi bagi para masyarakat yang membutuhkan, fakta dilapangan terlihat bahwa pelayanan di Kantor desa telah tersedia SOP dan juga berbagai informasi yang terkait dengan masyarakat seperti anggaran pendapatan dan belanja desa serta program-program yang akan dijalankan. Informasi tersebut berguna bagi

masyarakat, agar masyarakat tahu akan kegiatan dari pemerintah, selain itu arus informasi juga berasal dari kepala desa sendiri dengan memberikan arahan dan informasi di saat ada acara-acara di desa.

Selain informasi dari desa atau program yang dijalankan, informasi dari pemerintah kabupaten dan provinsi serta kebijakannya juga disebarakan melalui berbagai acara dan juga dilakukan melalui pengeras suara, sebagai contoh informasi bantuan dan penanganan covid-19 di desa yang semua masyarakat mtelah mengetahuinlalui usaha dari kepala desa dan pemerintah desa lainnya.

Secara konseptual, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dengan prinsip transparansi yang benar-benar diimplementasikan pada setiap aspek dan fungsi pemerintahan di daerah, apalagi bila di lengkapi dengan penerapan prinsip merit system dan reward and punishment dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Secara konkrit, penerapan prinsip transparansi dapat dijabarkan sebagai berikut

- a. Adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum dalam kaitannya dengan program-program pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa
- b. Adanya keterbukaan dalam hal pengambil keputusan publik dan dalam proses implementasi atau pelaksanaannya

Pemerintahan di Desa kunci utama untuk dapat memahami ataupun untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu dengan memerlukan berbagai pemahaman - pemahaman atas berbagai prinsip - prinsip yang juga terkandung di dalamnya. Adapun berbagai penyelenggaraan dalam suatu kepemerintahan yang baik dan juga bisa bertanggung jawab maka akan dapat tercapai apabila dalam suatu penerapan –

penerapan otoritas publik, administrasi dan juga ekonomi dalam tiga komponen tersebut yang disebut dengan *good governance* yang juga memiliki berbagai jaringan – jaringan dan juga interaksi – interaksi yang bisa dikatakan setara.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan, baik dari masyarakat, BPD dan tokoh masyarakat di desa kiawa dua mengenai pelaksanaan prinsip transparansi oleh kepala desa terlihat bahwa para informan cukup puas dengan kepemimpinan kepala desa dalam hal transparansi, selain memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, kepala desa juga memimpin para perangkatnya untuk bersikap transparan terhadap masyarakat dan melaporkannya kepada kepala desa apabila mengalami kesulitan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sikap kepemimpinan tersebut tercitra baik di mata masyarakat dan juga terhadap bawahan yang dipimpinnya. Jadi dalam penelitian ini kepemimpinan kepala desa dari apsek transpransi sudah tergolong baik.

2. Akuntabilitas

Untuk mengurus setiap urusan yang ada di desa, Kepala Desa memiliki tugas dalam memimpin dan juga menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat-perangkat desa dan kinerja Kepala Desa akan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. mekanisme pengawasan dan keseimbangan dimaksudkan untuk menghindari pemusatan kekuasaan yang hanya pada satu tangan. Secara yuridis formal, kedudukan tertinggi yang berada di desa dipimpin oleh kepala Desa, tetapi melihat realitas yang ada yaitu sumber-sumber kekuasaan yang ada di desa sangatlah beragam. Begitu pula dengan tradisi dan budaya yang ada di desa merupakan pembentukan pola pikir masyarakat desa.

Penerapan prinsip akuntabilitas akan mendorong setiap pejabat pemeintahan daerah untuk meleksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya; karena setiap tindakan dan keputusan yang di ambil harus dapat di pertanggungjawabkan

kehadapan publik maupun dari kaca mata hukum.

Secara operasional, domain ini dijabarkan melalui beberapa komponen antara lain:

1. Mengefektifkan proses pengawasan intensif dan terintegral terhadap keseluruhan proses pemerintahan oleh berbagai komponen, baik pemerintah maupun masyarakat;
2. Menerapkan mekanisme pertanggungjawab yang proporsional sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan;
3. Menyediakan informasi yang relevan, nyata dan actual mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai wujud pertanggungjawab pemerintah daerah.

Pemerintah desa juga memperhatikan dengan adanya prinsip-prinsip dalam partisipasi masyarakat. Dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat terhadap distribusi dana desa maka masyarakat turut untuk berpartisipasi dalam mengambil bentuk kegiatan-kegiatan yang berdasarkan kemasyarakatan. Tak hanya berpartisipasi saja, melainkan masyarakat desa juga turut andil dalam suatu kepentingan yang ada di desa dan juga melibatkan dalam hal pelaksanaan, monitoring, proses perencanaan, sampai pada tahap kegiatan evaluasi yang sudah terlaksanakan. Dengan adanya keterlibatan warga masyarakat desa sejak awal, maka pemerintahan bisa mengharapakan seluruh dana yang ditujukan untuk pengelolaan pembangunan desa dapat ditetapkan sebagai suatu kebutuhan masyarakat, bukan hanya melibatkan para pemerintahan desa dan juga elite-elite desa.

Kepala Desa selain mempunyai tanggung jawab akan Desa yang dipimpinnya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan seperti memberikan berbagai laporan-laporan dalam hal penyelenggaraannya di pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, yang mana untuk memberikan berbagai laporan yang terkait dengan kondisi yang ada di desa

tersebut dengan memberikan keterangan - keterangan seperti pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Bamusdes serta dapat menginformasikan laporan- laporan yang ada dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di lapangan, sikap akuntabilitas dalam kepemimpinan kepala desa kiawa dua sudah baik, dimana dalam kepemimpinannya, kepala desa selalu memberikan laporan kepada masyarakat dan atasannya dalam berbagai bentuk, baik lisan dan tulisan, laporan keuangan, laporan program dan juga kegiatannya diketahui masyarakat dan BPD, hal tersebut terlihat dari pernyataan dari para informan yang peneliti wawancarai. Kepemimpinan kepala desa khususnya dalam mewujudkan governance terwujud melalui aspek akuntabilitas dan hal tersebut tak terlepas dari partisipasi masyarakat. Peran masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas public yang baik oleh kepala desa juga sangat penting dimana masyarakat melakukan pengawasan dan juga memberikan nasihat kepada kepala desa terkait pelaksanaan program dan anggaran yang dikerjakan.

3. Daya Tanggap

Kepemerintahan dengan mewujudkan suatu tatanan yang baik (*good governance*) yang menjadi sebuah isu sentral dalam pembahasan yang paling utama dalam pengelolaan suatu pemerintahan, berbagai tuntutan-tuntutan yang juga dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat terhadap pemerintah untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik seperti searahnya dalam meningkatkan tingkat-tingkat dalam pengetahuan dan juga pentingnya pendidikan bagi masyarakat, selain dari pengaruhnya globalisasi, yang mana tak terkecuali pada tingkatan pemerinthaan terendah seperti di desa. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan suatu konsep akhir untuk dipergunakan secara regular didalam ilmu politik itu sendiri. Adapun salah satu prinsip yang terkait dalam good governance merupakan suatu konsep-konsep yang juga begitu erat dalam kaitannya dengan meningkatkan pelayanan publik. Saat ini pelayanan publik yang dirasakan oleh

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 4 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

masyarakat belum bisa memberikan kemudahan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, ada banyak berbagai pelayanan publik yang diberikan oleh masyarakat tidak malah secara efektif dan juga efisien. Dalam kondisi saat ini pelayanan publik yang diberikan cenderung sangat tidak memuaskan dan juga berbelit-belit dalam berbagai pelayanan publik, sehingga biasanya banyak memicu berbagai konflik.

Sikap daya tanggap dari seorang pemimpin terutama kepala desa sangat penting bagi citra dimata masyarakat, apabila seorang kepala desa tidak tanggap dalam melayani masyarakat, maka akan tercitra sombong dan tidak peduli di mata masyarakat, oleh sebab itu daya tanggap yang baik mampu meningkatkan citra diri kepala desa di mata masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan para informan di lapangan, maka peneliti melihat bahwa kepala desa kiawa dua cukup tanggap dalam melayani masyarakat, hal tersebut terungkap dari informan tokoh masyarakat dan informan masyarakat, dimana kepala desa memberikan layanan dengan tanggap, dimana beliau tidak hanya melayani di kantor namun juga di rumah selain itu bukan hanya di jam kerja saja melainkan diluar jam kerja juga kepala desa tetap melayani masyarakat yang membutuhkan.

Penutup

Kesimpulan

1. Kepemimpinan kepala desa Kiawa Dua dalam mewujudkan *good governance* di Desa Kiawa Dua dalam aspek transparansi sudah baik di mata masyarakat dan juga BPD, kegiatan transparansi dari kepala desa terwujud dalam berbagai hal dan kegiatan dimana pemerintah desa terbuka terhadap masukan dan juga memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat yang membutuhkan dalam berbagai situasi baik formal maupun tidak formal.
2. Aspek akuntabilitas dalam mewujudkan *good governance* oleh Kepala Desa

Kiawa Dua terwujud dalam kegiatan laporan bagi masyarakat dan juga kepada pihak kecamatan dan kabupaten. Sisi akuntabilitas terlihat dari laporan APBDes yang setiap tahun dibuat, selain itu juga kepala desa mampu memberikan jawaban kepada masyarakat terkait semua program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

3. Daya tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh kepala desa kiawa dua juga sudah cukup baik, dimana kepala desa selalu melayani keluhan masyarakat dengan daya tanggap positif tanpa mengenal waktu dan tempat. Dengan daya tanggap yang baik memberikan kepuasan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan pelayanan oleh pemerintah desa dan membentuk citra positif di mata masyarakat.

Saran

1. Perlunya mempertahankan serta meningkatkan aspek transparansi oleh kepala desa kepada masyarakat dengan memanfaatkan perangkat desa yang ada. Perlunya peningkatkan kualitas aparat yang baik dan proporsional terhadap tugas pokok dan fungsinya guna menunjang aspek *good governance* tersebut.
2. Pentingnya juga kepala desa memperhatikan kinerja bawahan serta pekerja proyek guna menunjang hasil laporan/ akuntabilitas, agar supaya terhindari dari kesalahan administrasi terlebih pelanggaran oknum tertentu, sehingga citra baik tetap terjaga dimata masyarakat.
3. Perlunya mempertahankan sikap yang baik hati dan memiliki daya tanggap serta kepedulian bagi masyarakat dengan tetap melayani masyarakat sepenuh hati serta meningkatkan citra pemimpin yang baik di mata masyarakat khususnya di masyarakat desa Kiawa Dua.

Daftar Pustaka

Arifin, Zainal, 2010, *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*, Remaja. Rosdakarya

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 4 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Good governance”, Makalah, Jakarta

- Bernadine R. Wirjana, M.S.W dan Susilo Supardo, 2006, *Kepemimpinan, Dasar-Dasar Dan Pengembangannya*. CV. Andi offset. Yogyakarta.
- Danim, sudarwan, 2004. *Motivasi, kepemimpinan dan efektifitas kelompok*. Jakarta; PT. Rineka Cipta
- Dwipayana, AAGN. Ari. 2003. *Membangun Good Governance* . Raja Grafindo Pustaka, Jakarta
- Hamalik, oemar. 2001. *Pengembangan sumberdaya manusia manajemen peletihan Ketatanegaraan; pendekatan terpadu jakarta* : Bumi Aksara
- Inu Kencana Syafi'ie, 2003, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Refika Aditama Bandung
- Joko Purnomo. Dkk. 2008. *Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik (Pelaksanaan Good Governance di Tingkat Desa)*. Yogyakarta: Penerbit Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Kerlinger, Fred N and Elazar J.Padhazur A. 2009. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Komite Anti Korupsi (KoKAK), 2002, *“Panduan Rakyat Memberantas Korupsi”*, Cetakan Pertama, Penerbit Komite Anti Korupsi (KoAk), Bandar Lampung
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Masyarakat Transparansi Indonesia Indonesia, 2002, *“Supermasi Hukum”*, Modul, Jakarta
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi H. 1997, *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Riswanda, I 2002, *“Desentralisasi, demokratisasi, dan Pembentukan*
- Sirajjudin, Sukriano, Winardi, 2012. *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Jakarta : Setara Press.
- Sedarmayanti, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Refika. Aditama
- Sedarmayati, 2003. *Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edi dkk, 2001, *“Good governance Untuk Daulat Siapa?”* Forum LSM DIY, Yogyakarta.
- Sumbu, Telly, dkk, 2010, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Wasistiono dan Tahir. I. M. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokusmedia
- Zullcarnain, happy Bone, 2002, *“Kendala Terwujudnya Good governance”*, Artikel.